

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP) TAHUN 2022

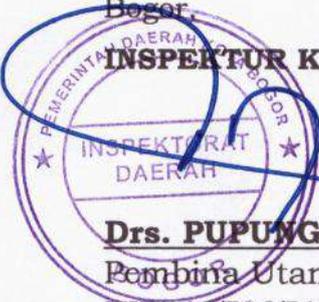


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kota Bogor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 pada Inspektorat Daerah Kota Bogor ini kami sampaikan. Akhirnya, semoga semua aktivitas yang kita lakukan selama ini, menjadi amal ibadah dan kebaikan yang senantiasa diterima oleh Allah SWT. Aamiin.

Bogor, 2022
INSPEKTUR KOTA BOGOR.

Drs. PUPUNG W. PURNAMA, M.Si., OGI
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19700715 199009 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Organisasi	3
D. Struktur Organisasi	3
E. Aspek Strategis Organisasi	5
F. Sistematika Laporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	9
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	9
C. Program dan Indikator Kinerja Program	10
D. Kegiatan/Subkegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan/ Subkegiatan	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
1. Target dan Kinerja Tahun 2021 dan Perbandingannya dengan Tahun Lalu	18
a. Target dan Kinerja Sasaran	18
1) Indeks RB	19
2) Indeks RB Inspektorat Daerah Kota Bogor	19
3) Maturitas SPIP	20
4) Indeks Persepsi Anti Korupsi	21
5) Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	21
6) Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	21



B. Capaian Kinerja Tahun 2022 Perbandingannya dengan
target Capaian Perencanaan Strategis Tahun 2024 ----- 55

BAB IV PENUTUP ----- 56

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Isu Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor -----	4
Tabel 1.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan -----	5
Tabel 2.1	Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor -----	10
Tabel 2.2	Target dan Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2021 -----	10
Tabel 2.3	Rencana Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Tahun 2021 -----	12
Tabel 3.1	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2021 -----	19
Tabel 3.2	Capaian Predikat Level per Elemen -----	20
Tabel 3.3	Perbandingan antara realisasi kinerja level kapabilitas APIP antara capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya -----	21
Tabel 3.4	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP -----	23
Tabel 3.5	Tabel Penilaian oleh BPKP -----	23
Tabel 3.6	Perbandingan realisasi kinerja Nilai Level Maturitas SPIP antara capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya -----	24
Tabel 3.7	Sasaran Penerapan ISO 37001:2016 -----	26
Tabel 3.8	Perbandingan realisasi kinerja Nilai Akip Inspektorat antara capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya -----	29
Tabel 3.9	Daftar Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2022 -----	32
Tabel 3.10	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kota -----	33
Tabel 3.11	Jumlah dan Persentase PD berdasarkan kategori nilai ----	34
Tabel 3.12	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 - 2021 -----	38
Tabel 3.13	Penyelesaian Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun Pemeriksaan 2011 - 2021 -----	39
Tabel 3.14	Rekap pemantauan TLHP Inspektorat Kota Bogor -----	40



Tabel 3.15	Capaian Kinerja 2022 dalam perbandingannya dengan target capaian perencanaan strategis tahun 2024 -----	48
Tabel 3.16	Capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang keberhasilan kinerja sasaran Tahun 2022 -----	52
Tabel 3.17	Alokasi dan realisasi anggaran tahun 2022 -----	56
Tabel 4.1	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2022 -----	56
Tabel 3.17	Realisasi Indikator Program Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2022-----	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah -----	2
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Per 31 Desember 2021 -----	3
Gambar 3.1	Penghargaan Level Kapabilitas APIP -----	21
Gambar 3.2	Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 -----	27
Gambar 3.3	Grafik Perkembangan Tindak Lanjut Temuan BPK RI -----	38
Gambar 3.4	Grafik Pemeriksaan Tindak Lanjut Tahun 2018 -----	41
Gambar 3.5	Grafik Pemeriksaan Tindak Lanjut Tahun 2019 -----	41
Gambar 3.6	Grafik Pemeriksaan Tindak Lanjut Tahun 2020 -----	42
Gambar 3.7	Grafik Pemeriksaan Tindak Lanjut Tahun 2021 -----	42
Gambar 3.8	Grafik Pemeriksaan Tindak Lanjut Tahun 2022 -----	44
Gambar 3.9	Progres MCP Tahun 2022 -----	46



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 Inspektorat Daerah Kota Bogor menginformasikan tugas dan fungsi serta hasil capaian kinerja tahun 2022 Inspektorat Daerah Kota Bogor yang merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 Inspektorat Daerah Kota Bogor, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dan wujud pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja (Jankin) Inspektorat Daerah Kota Bogor.

Inspektorat Daerah Kota Bogor telah menetapkan dan merealisasikan tujuan dan sasaran utama, dengan capaian kinerja Utama pada tahun 2022, yaitu terdiri atas :

Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
Tujuan: Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Level	A	BB	95%
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah	Level Kapabilitas APiP	Level	3	3	100%
	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Poin	80,01	75,81	94,75
Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP	Level	3	2,988	99,6%
	Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota	Poin	22,50	18,82	83,64
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	%	75,00	73,06	97,41

Capaian kinerja program sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja				Persentase	
		Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Vol Target	Realiasi		
1	2	3	4	5	6	7	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Inspektorat Daerah						
1.	Program Penunjang Urusan	1.1	Nilai AKIP Inspektorat	Poin	A	A	100%



No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja					Persentase
		Uraian Indikator Kinerja		Satuan	Vol Target	Realisasi	
1	2	3		4	5	6	7
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.2	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bidang Pengawasan Intern	Poin	3,4	3,53	103,8%
		1.3	Gap Analisis Kompetensi	%	30	14,70	121,85%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah							
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.1	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	75%	97,22%	129,62%
		2.2	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100	100%
		2.3	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	%	85%	83,33%	98,03%
		2.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	%	90	92,657	102,95
		2.5	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	%	80	91,63	114,54
		3.1	Persentase Penerapan SPIP Pada Perangkat Daerah	%	82	100	121,95%
		3.2	Persentase Capaian MCP KPK	%	76,45	93	82,20
		3.3	Jumlah PD	Unit	6	6	100%



No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja				Realisasi	Persentase
		Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Vol Target			
1	2	3	4	5	6	7	
		yang diusulkan mendapatkan Predikat WBK/WBBM	Kerja				

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp18.980.289.880,00 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp19.922.456.419 Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level perangkat daerah adalah 4,73% atau sebesar Rp942.166.539,00. Berdasarkan besaran penggunaan anggaran maka dapat diasumsikan telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya biaya pada Inspektorat Daerah Kota Bogor.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui rangkap penugasan Auditor dan P2UPD dalam melaksanakan pengawasan intern penyelenggaraan pemerintah daerah.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu kewajiban bagi instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. LAKIP menjadi alat untuk mengukur kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

Di Inspektorat Daerah Kota Bogor, penyusunan LAKIP dilakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi yang diemban sebagai unit pengendali intern pemerintah daerah. Inspektorat Daerah Kota Bogor bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah di Kota Bogor.

Penyusunan LAKIP dilakukan sebagai upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi. LAKIP juga menjadi alat untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah.

Dalam penyusunan LAKIP, Inspektorat Daerah Kota Bogor mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan melibatkan seluruh unit kerja di instansi pemerintah dan melalui proses yang sistematis dan terstruktur.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) di Inspektorat Daerah Kota Bogor adalah untuk

memenuhi kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah di Kota Bogor.

Tujuan penyusunan LAKIP di Inspektorat Daerah Kota Bogor adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kinerja instansi pemerintah kepada publik, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah.
- 2) Memotivasi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja.
- 3) Menyediakan alat pengukuran kinerja dan evaluasi untuk instansi pemerintah, sehingga dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan.
- 4) Menyediakan informasi yang diperlukan bagi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menilai kinerja instansi pemerintah, serta memfasilitasi dialog antara instansi pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam memperbaiki kinerja dan pelayanan publik.
- 5) Dengan penyusunan LAKIP yang baik dan terstruktur, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan pemantauan kinerja instansi pemerintah di Kota Bogor.

C. Gambaran Umum Organisasi

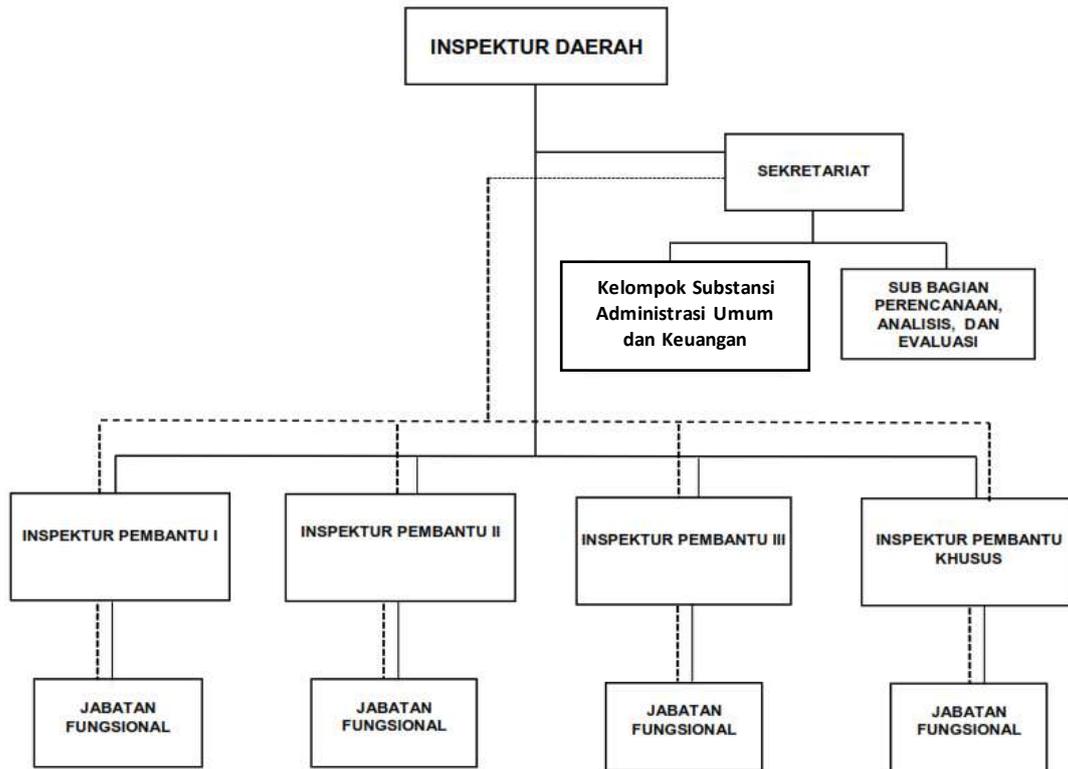
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 157 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah Kota Bogor

mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kota Bogor menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal meliputi kegiatan peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah, kegiatan asistensi/pendampingan, kegiatan reviu, kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan pemeriksaan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pencegahan tindak pidana korupsi;
- d. pengawasan program reformasi birokrasi;
- e. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota dan/atau tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota;
- f. pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas Inspektorat Daerah;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana, dan prasarana Inspektorat Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi

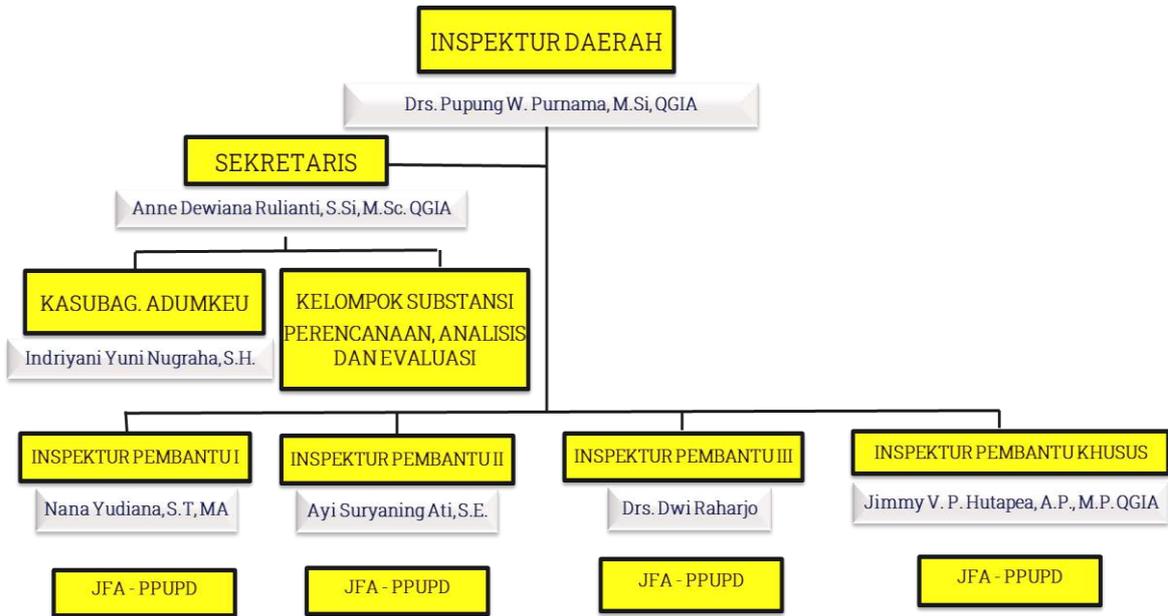
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 157 Tahun 2021

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Bogor terdiri dari:

1. Inspektur Daerah;
2. Sekretaris membawahi:
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - b. Kelompok Substansi Administrasi Umum dan Keuangan;
3. Inspektur Pembantu I membawahi Jabatan Fungsional;
4. Inspektur Pembantu II membawahi Jabatan Fungsional;
5. Inspektur Pembantu III membawahi Jabatan Fungsional;
6. Inspektur Pembantu Khusus membawahi jabatan Fungsional.



**Gambar 1.2 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
(Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021)**

E. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Inspektorat Daerah Kota Bogor mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui misi kedua, **Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas**. Kota Bogor yang cerdas berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang kolaboratif, transparan, dan melayani. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Mencermati hal-hal tersebut di atas ditinjau dari sisi Sumber Daya Manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan jumlah jangkauan obyek pengawasan yang ada, maka terdapat Isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Isu Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor

No.	Isu Strategis	Masalah	Akar Masalah
1.	Tuntutan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih	1 Belum optimalnya akuntabilitas Kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	1 Sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal
			2 belum seluruhnya rekomendasi laporan hasil reviu LKPD ditindaklanjuti
			3 Penyelenggaraan pengawasan perangkat daerah belum efektif
			4 Rekomendasi temuan BPK, temuan Inspektorat Daerah Provinsi dan APIP belum secara optimal ditindaklanjuti oleh perangkat daerah;
			5 Penerapan SPIP level 3 pada perangkat daerah belum optimal;
			6 Persentase PD yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK masih rendah
			7 Belum lengkapnya Norma, Standar, Prosedur, Kriteria pengawasan;
		2 Belum optimalnya kapabilitas APIP	1 belum meratanya kompetensi APIP

Sumber : Hasil olahan data Inspektorat Kota Bogor, 2023

Terhadap Isu strategis tersebut dan untuk mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kota Bogor dalam lima tahun mendatang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan pada sub bab ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kota Bogor yang Ramah Keluarga			
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat	1. Meningkatkan kompetensi APIP	1) Pemberian fasilitas Diklat, Bimtek, Sosialisasi, serta nilai-nilai integritas kepada APIP
		2. Optimalisasi penjaminan mutu dan konsultasi melalui penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko	2) Penyusunan dan penyempumaan norma, standar dan prosedur pemeriksaan
			3) Penyusunan PKPT berbasis risiko
			4) Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan melalui koordinasi dan sinergitas antar APIP, BPKP, Kementerian PAN RB dan instansi lainnya maupun dengan Objek Pemeriksaan.
		3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	1) Penguatan komitmen pegawai dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi;
			2) Peningkatan kualitas hasil penilaian reformasi birokrasi secara mandiri (self assessment)
		Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	4. Mendorong peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah
	2) Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan melalui koordinasi dan sinergitas antar APIP, BPKP, Kementarian PAN RB dan instansi lainnya maupun dengan Objek Pemeriksaan		
	3) Mengembangkan deteksi dini (<i>Early Warning System</i>) sebagai tindakan pencegahan dalam pengadaan barang/jasa khususnya yang berhubungan dengan pembangunan fisik.		

Visi : Terwujudnya Kota Bogor yang Ramah Keluarga			
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas			
			4) Memantapkan peran Inspektorat dalam pemberian jasa konsultasi.
			5) Pendampingan tenaga ahli dalam pelaksanaan pengawasan
			6) Peningkatan pemutakhiran data tindak lanjut
			7) Meningkatkan upaya pencegahan korupsi melalui langkah strategis yang terpadu dan koordinatif dengan perangkat daerah terkait dalam rangka capaian kinerja program pencegahan korupsi (MCP KPK) dan hasil survei penilaian integritas KPK

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

F. Sistematika Laporan

Sistematika laporan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan kinerja;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang;
7. keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau di hasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi.

Sebagai penjabaran visi dan misi Inspektorat Daerah Kota Bogor yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi, maka tujuan dari Inspektorat Daerah Kota Bogor dengan mengacu kepada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah *“Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel”*. Indikator tujuannya adalah level maturitas SPIP dengan target level 3.

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran (Perjanjian Kinerja Eselon II/Inspektur)

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur. Sasaran juga merupakan alat pemacu agar seluruh organisasi sadar akan sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Inspektorat Daerah Kota Bogor telah merumuskan sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1
Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor**

Sasaran	Indikator	Formula Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah	Level Kapabilitas APIP	Penilaian Mandiri dan QA Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3
	Index Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Evaluasi Implementasi PMPRB sebagaimana Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2022 tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	NA	80,01	81	82	82
Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP	Penilaian Tingkat Maturitas SPIP oleh BPKP	3	3	3	3	3
	Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota	Hasil penilaian/evaluasi Evaluasi AKIP oleh APIP/Kemenpan	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Hasil Survei Penilaian Integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

C. Program dan Indikator Kinerja Program

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka program yang dilaksanakan Inspektorat pada Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Target dan Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2022

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja Utama				
		Uraian Indikator Kinerja	Formula Indikator Kinerja	Satuan	Satuan	
1	2	3	4	5	6	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Inspektorat Daerah					
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.1	Nilai AKIP Inspektorat	Hasil Evaluasi SAKIP	A	Poin
		1.2	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bidang Pengawasan Intern	Survey Kepuasan Perangkat Daerah	3,4	Poin
		1.3	Gap Analisis Kompetensi	Gap kompetensi ASN dengan persyaratan kompetensi jabatan	30	%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah					
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.1	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	(Jumlah PD yang mencapai nilai BB keatas x 100%) / Jumlah Total PD yang dievaluasi	75	%
		2.2	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	(Jumlah PD yang sesuai dengan Akuntansi Pemerintah x 100%) / Jumlah Total PD	85	%
		2.3	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	(Jumlah Rekomendasi pengawasan Internal yang ditindaklanjuti x 100%) / Jumlah Rekomendasi	92,657	%
		2.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	(Jumlah Rekomendasi pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti x 100%) / Jumlah Rekomendasi	91,63	%
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.1	Prosentase Penerapan SPIP Pada Perangkat Daerah	(Jumlah PD yang menyusun Manajemen Risiko x 100%) / Jumlah Total PD	82	%
		3.2	Persentase Capaian MCP KPK	Hasil Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi	76,45	%

**INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)**

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja Utama				
		Uraian Indikator Kinerja	Formula Indikator Kinerja	Satuan	Satuan	
1	2	3		4	5	6
				Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)		
		3.3	Jumlah PD yang diusulkan mendapatkan Predikat WBK/WBBM	Hasil penilaian/evaluasi Tim Penilai Internal APIP terhadap unit kerja yang membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan ke KemenpanRB	6	Unit Kerja

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

D. Kegiatan/Subkegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan/Subkegiatan

Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 meliputi pelaksanaan 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp18.849.405.373,00 dan bertambah Rp1.073.051.046,00 setelah difocusing menjadi sebesar Rp19.922.456.419,00. Rencana Kinerja Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kota Bogor mengalami perubahan dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3
Rencana Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Pendanaan
Inspektorat Daerah Tahun 2022**

KODE URUSAN/PROGRAM /KEG/SUB	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA	ANGGARAN
				REALISASI	ALOKASI (Rp)
1	5	6	7	9	11

	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A	
		Level kapabilitas APIP	Level	3	
		Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Poin	75,81	

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)

KODE URUSAN/PROGRAM /KEG/SUB	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINE RJA	ANGGARAN		
						REA LISA S	ALOKASI (Rp)		
1	5			6	7	9	11		
6.01.01	A	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks	3,53	19.349.379.119		
				Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	A			
				Gap Analysis Komptensi	%	14,70			
6.01.01.2.01	1		Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat Daerah	%	100	179.619.800	
	a			Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	15.232.000	
	2		Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	164.387.800
a									
	a			Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	52	15.199.451.152	
	3		Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	%	100	1.048.000.800,00	
	a			Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	10	103.605.000	
6.01.01.2.05.03	b			Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	52	944.395.800,00	
6.01.01.2.05.11	4		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	906.414.600	
	a			Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	105.202.000	

**INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)**

KODE URUSAN/PROGRAM /KEG/SUB	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA	ANGGARAN	
						REALISASI	ALOKASI (Rp)	
1	5			6	7	9	11	
	b			Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	85.334.300
	c			Sub Kegiatan: Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	66.711.500
6.01.01.2.06.05	d			Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	536.670.000
6.01.01.2.06.09	e			Sub Kegiatan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	112.496.800
	5		Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	%	90	722.665.200
6.01.01.2.07	a			Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	15.797.800
6.01.01.2.07.05	b			Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	37	706.867.400
6.01.01.2.07.06	6		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	545.547.567
	a			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	195.194.175
	b			Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7	350.353.392
	7		Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Persentase BMD lingkup Inspektorat ber kondisi baik	%	100	747.680.000

**INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)**

KODE URUSAN/PROGRAM /KEG/SUB	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA	ANGGARAN	
						REALISASI	ALOKASI (Rp)	
1	5			6	7	9	11	
	a		Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	263.430.000
	b			Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	92	115.138.000
	c			Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	369.112.000
6.01.01.2.09.09		Sasaran 2 :			Level Maturitas SPIP	Level	3	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah			Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota	Poin	22,50	
					Indeks Persepsi Anti Korupsi	%	73,06	
	B	Program Penyelenggaraan Pengawasan			Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	97,22	401.792.200
					Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100	
6.01.02					Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas Internal	%	92,657	
					Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas eksternal	%	91,63	
					Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	%	100	
	8		Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	kegiatan	2	336.749.200
	a			Sub Kegiatan: Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	4	41.676.500

**INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)**

KODE URUSAN/PROGRAM /KEG/SUB	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINE RJA	ANGGARAN	
						REA LISA S	ALOKASI (Rp)	
1	5			6	7	9	11	
	b			Sub Kegiatan: Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	7	6.319.800
	c			Sub Kegiatan: Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	26	94.136.300
	d			Sub Kegiatan: Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	52	43.932.600
	e			Sub Kegiatan: Kerja sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	117.000.000
6.01.02.2.01.06	f			Sub Kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	33.684.000
	9		Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Persentase laporan pengaduan yang diselesaikan sesuai kewenangan	%	100	65.043.000
	a			Sub Kegiatan: Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	33.623.500
6.01.02.2.02.01	b			Sub Kegiatan: Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	5	31.419.500
6.01.02.2.02.02	C	Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Aistensi			Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	%	100	171.285.100
					Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	Unit Kerja	6	
6.01.03					Persentase Capaian MCP KPK	%	96,33	
	10		Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah jenis dokumen NSPK di bidang pengawasan (dan fasilitasi pengawasan)	NSPK	2	38.556.800

**INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)**

KODE URUSAN/PROGRAM /KEG/SUB	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINE RJA	ANGGARAN
						REA LISA S	ALOKASI (Rp)
1	5			6	7	9	11
	a		dan Fasilitasi	Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekome ndasi	21.936.800
6.01.03.2.01.01	b			Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekome ndasi	16.620.000
6.01.03.2.01.02	1 1		Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi		Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Manajemen Risiko	%	132.728.300
					Jumlah Unit Kerja yang dilakukan pendampingan Pelaksanaan RB bidang penguatan pengawasan dan pembangunan ZI menuju WBK	Unit Kerja	10
6.01.03.2.02					Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan Evaluasi MCP KPK Pemerintah Kota Bogor	kegiatan	2
	a			Sub Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangka t Daerah	66.679.900
	b			Sub Kegiatan: Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangka t Daerah	34.955.600
	c			Sub Kegiatan: Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	1.528.000
6.01.03.2.02.03	d			Sub Kegiatan: Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangka t Daerah	29.564.800

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Target dan Kinerja Tahun 2022 dan Perbandingannya dengan Tahun Lalu

Pengukuran tingkat capaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing masing indikator kinerja serta membandingkannya

a. Target dan Kinerja Sasaran

Target dengan realisasi masing masing indikator kinerja sasaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1

Realisasi Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
Tujuan: Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Level	A	BB	95%
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%
	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Poin	80,01	75,81	94,75%
Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP	Level	3	2,988	99,6%
	Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota	Poin	22,50	18,82	83,64
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	%	75,00	73,06	97,41%

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

1) **Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan pada akhir Tahun 2022**

Secara umum Kinerja dan realisasi anggaran program/kegiatan sudah tercapai, namun masih terdapat kekurangan yang menjadikan beberapa sasaran program/kegiatan tidak tercapai dengan maksimal khususnya pada :

1) Indeks Reformasi Birokrasi

Hal yang mempengaruhi tidak maksimalnya Indeks Reformasi Birokrasi adalah:

- a. belum dilakukannya pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap RB dan budaya kerja;
- b. Evaluasi rencana aksi agen perubahan belum dilakukan secara maksimal dan belum adanya mekanisme pemberian *reward and acknowledgement* bagi agen perubahan apabila proyek perubahan berhasil;
- c. Regulasi atau kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kota Bogor belum dilakukan pemetaan atas dampak dari kebijakan yang dihasilkan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan;
- d. Peta proses bisnis baru disusun pada dinas Kesehatan dan Sekretariat Kota Kota Bogor, selain itu belum bisa menggambarkan dengan jelas kesesuaian efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi dengan kinerja;
- e. Pemerintah Kota Bogor sedang menyusun kebijakan manajemen talenta. Assesmsnt belum dilaksanakan kepada seluruh pegawai untuk memetakan Gap Kompetensi dalam rangka mendukung manajemen talenta;
- f. Telah mengintegrasikan aplikasi simpeg denan e-sakip, e-sppt, simgajiweb taspen untuk pengukuran kinerja organisasi dan individu.
- g. Belum dilakukan monitorin dan evaluasi terhadap capaian kinerja sehingga hasilnya belum dijadikan daar dalam

- pemberian reward and punishment, seta aplikasi tersebut belum dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pegawai;
- h. Pembangunan Zona Integritas yang dilakukan pada beberapa PD di tahun 2022 ini belum ada yang berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM; dan
 - i. Telah memiliki beragam inovasi yang dikembangkan oleh seluruh PD dan memiliki sistem informasi dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), namun hasil SKM belum ditindaklanjuti sehingga belum tampak strategi perbaikan yang dilakukan untuk pelayanan publik.

2) Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah

Hal yang mempengaruhi tidak maksimalnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi lingkup Inspektorat Daerah Kota Bogor adalah responden yang tidak memahami kriteria dan tatacara pengisian form instrumen pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah tahun 2022, sehingga capaian Hasil survei Kepuasan masyarakat seharusnya mendapatkan nilai 4,30 hanya mendapatkan nilai 3,56 dan pemilihan target nilai yang tinggi untuk Nilai pembangunan Zona Integritas yang seharusnya kategori C (unit kerja melakukan pencanangan zona integritas) menjadi tidak sesuai dan mendapatkan nilai akhir yang tidak maksimal.

3) Level Maturitas SPIP

Hal yang mempengaruhi tidak maksimalnya nilai Level Maturitas SPIP adalah Tidak terpenuhinya implementasi pada unsur SPIP (Penilaian Risiko, IEPK) yang disebabkan belum terupdatenya regulasi terkait dengan penilaian risiko dan IEPK, Penilaian risiko tingkat kota belum dilaksanakan dan IEPK belum diimplementasikan dengan optimal.

4) Indeks Persepsi Anti Korupsi

Hal yang mempengaruhi tidak maksimalnya nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi adalah persepsi pelayanan publik belum memuaskan pengguna layanan/ masyarakat dikarenakan belum optimalnya sosialisasi antikorupsi terhadap penerima dan pemberi layanan secara berkala dan berkelanjutan.

5) Presentase Tindak Lanjut rekomendasi Pengawasan Internal

Hal yang mempengaruhi tidak maksimalnya nilai Presentase Tindak Lanjut rekomendasi Pengawasan Internal adalah status tindak lanjut yang belum selesai disebabkan karena perangkat daerah tidak memahami rekomendasi yang disampaikan oleh Auditor dan tidak adanya petugas khusus yang menangani pelaksanaan tugas tersebut yang menjadikan Dokumen tindak lanjut yang diterima/disampaikan oleh Perangkat Daerah tidak sesuai dengan rekomendasi.

6) Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Hal yang mempengaruhi tidak maksimalnya nilai Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah adalah adanya tumpang tindih pekerjaan pengawasan, data pengawasan internal yang lama didapatkan dan jumlah auditor yang terbatas yang menjadikan kegiatan pengawasan tidak selesai tepat waktu dan tepat sasaran.

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pelayanan Inpektorat Daerah

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%
Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	poin	80,01	75,81	94,76

Sasaran ini merupakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam lima tahun mendatang dalam meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah. Sasaran ini memiliki target indikator kinerja Level Kapabilitas APIP level 3. Kapabilitas Aparat Intern Pemerintah (APIP) adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Pada tahun 2022 kapabilitas APIP mendapatkan level 3. Kapabilitas APIP Kota Bogor dinilai oleh BPKP Pusat berdasarkan surat laporan Nomor : LQAPIP-1027/PW10/6/2019 tanggal 27 Desember 2019. Berdasarkan hasil tersebut APIP Kota Bogor mendapatkan predikat level 3 (integrated). Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.2
Capaian Predikat Level per Elemen**

No	Elemen	Level
1	Peran dan Layanan	3
2	Pengelolaan sumber daya manusia	3
3	Praktik profesional	3
4	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	3
5	Budaya dan hubungan organisasi	3
6	Struktur tata kelola	3

Level Kapabilitas APIP Level 3 disebut Integrated, menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

*Tabel 3.3
Perbandingan antara realisasi kinerja level kapabilitas APIP antara capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya*

	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021
Level Kapabilitas APIP	3	3	3
Interpretasi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi
Tingkat / Level Kapabilitas APIP	3	3	3



Gambar 3.1 Penghargaan Level Kapabilitas APIP

Sasaran pertama ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari kegiatan berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bogor di tahun 2022 adalah 70,76 atau kategori “BB”. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
A	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	12,28	14,37
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,96	5,69
	III. Reform	30,00	18,55	18,68
	Total Komponen Pengungkit	60,00	35,79	38,74
B	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,16	8,26
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,29	9,71
3.	Pemerintahan Yang bersih dan Bebas KKN	10,00	8,14	8,35
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,30	5,69
	Total Komponen Hasil	40,00	31,88	32,02
Indeks Reformasi Birokrasi (pengungkit+ Hasil)		100,00	67,67	70,76

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kota bogor telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditadai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan komponen hasil. Namun demikian Pemerintah Kota Bogor perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sasaran 2 :Meningkatnya akuntabilitas Kinerjadan Keuangan Pemerintah

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Level Maturitas SPIP	Level	3	2,988	99,6%
Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota	poin	22,50	16,08	71,46%
Indeks Persepsi Anti Korupsi	%	75,00	73,06	97,41%

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

Indikator Level Maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Level maturitas SPIP bertujuan mengetahui penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Perkembangan Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kota Bogor dimulai sejak Tahun 2017 dengan nilai 1,43 (rintisan). Pada Tahun 2018 dilakukan penilaian BPKP dengan hasil yang masih sama. Terkait dengan hal ini, Inspektorat Daerah Kota Bogor menargetkan Level Maturitas SPIP sejak Tahun 2019 berada pada level 3 dengan tingkat kematangan terdefinisi namun terjadi penurunan nilai pada tahun 2022 Nilai menjadi kategori berkembang. Tingkat kematangan Implementasi SPIP diukur dalam skala 0 hingga 5 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat kematangan Implementasi SPIP

Level	Tingkat Maturitas	Interval Score
0	Belum ada	Kurang dari 1,0 ($0 < \text{score} < 1,0$)
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

Pemerintah Daerah Kota Bogor pada akhir tahun 2019 mendapatkan predikat level maturitas SPIP yaitu level 3. Level 3 merupakan interpretasi dari TERDEFINISI yang artinya kebijakan/SOP telah diimplementasikan oleh sebagian besar pejabat dan pegawai terkait dan/atau unit kerja dilingkungan K/L/D serta bukti adanya implementasi kebijakan/SOP telah didokumentasikan dengan baik. Penilaian level ini dilakukan oleh BPKP untuk mengukur

kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada suatu Pemerintah Daerah dari level 1 sampai level 5.

Berdasarkan penilaian dan laporan oleh BPKP Pusat atas penilaian level maturitas SPIP Pemerintah Kota Bogor untuk tahun 2022 memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada 2 (Berkembang) dengan nilai 2,880 dengan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,025 serta skor indeks Efektifitas pengendalian korupsi (IEPK) sebesar 1,874. Rincian hasil penilaian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Tabel Penilaian oleh BPKP

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1.	Penetapan Tujuan	40%	1,200
2.	Struktur dan Proses	30%	0,828
3.	Pencapaian Tujuan	30%	0,960
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		2,988
	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)		2,650
	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		2,658

Rincian masing-masing komponen penilaian disajikan pada Lampiran 1, 2, dan 3.

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi kinerja Level Maturitas SPIP antara capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya

	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022
Level Maturitas SPIP	1,47	3	3	3	2,988
Interpetasi	Rintisan	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Berkembang
Tingkat Level Maturitas SPIP	2	3	3	3	2

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Belum Optimal Pemerintah Kota Bogor telah memiliki

kebijakan tentang penerapan manajemen risiko yang baru yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Kota Bogor. Namun kebijakan manajemen risiko tersebut masih mengacu kepada ketentuan Manajemen Risiko Lama, belum sesuai dengan ketentuan yang baru yaitu Peraturan Deputi Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah daerah. Berdasarkan diskusi dan observasi dengan pihak Inspektorat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada, terdapat beberapa kondisi sebagai berikut:

- a. Proses penyusunan risk register belum disesuaikan dengan konteks hal ini bisa dilihat dari belum adanya risk register terkait dengan sasaran strategis tingkat pemerintah daerah maupun sasaran strategis OPD. Risk register yang disusun umumnya baru terkait dengan risiko operasional.
- b. Risk register masih bersifat pemenuhan kebutuhan formal/administratif dan belum digunakan untuk pengambilan keputusan. Ini dapat dilihat dari belum dilaksanakannya seluruh Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan belum adanya pemantauan secara rutin dan memadai atas seluruh RTP maupun kejadian risiko.
- c. Inspektorat belum melaksanakan monitoring secara rutin dan memadai terhadap penerapan manajemen risiko.
- d. OPD di lingkungan pemerintah Kota Bogor pada umumnya belum memiliki program pelatihan maupun in house training untuk peningkatan kompetensi SDM terkait manajemen risiko.

- e. Pemerintah Kota Bogor dan OPD belum mengalokasikan anggaran yang spesifik untuk digunakan dalam rangka implementasi manajemen risiko di tingkat pemda dan tingkat OPD.
- f. Pemerintah Kota Bogor belum menetapkan kebijakan manajemen risiko terkait dengan kemitraan dengan pihak ketiga secara memadai Kondisi tersebut disebabkan belum adanya kesadaran dari seluruh pemangku kepentingan (mulai dari pimpinan OPD sampai dengan staf) tentang pentingnya penerapan manajemen risiko terhadap pencapaian tujuan organisasi.
- g. Sasaran ini didukung oleh Program:
 - 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan, kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
 - b) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
 - 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, kegiatan:
 - a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
 - b) Pendampingan dan Asistensi.

Rekomendasi untuk Kepala Perangkat Daerah agar menyusun rencana tindak terkait penerapan SPIP dan manajemen risiko, antara lain :

- 1) Membentuk persepsi bersama bahwa peraturan dan hukum merupakan hal yang amat penting dalam pengambilan keputusan, baik itu keputusan pribadi atau organisasional;
- 2) Mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk penerapan manajemen risiko dengan melaksanakan pelatihan bagi anggota Unit Pemilik Risiko (UPR) Strategis Pemda, Strategis OPD dan Operasional;

- 3) Menggunakan informasi terkait risiko di tingkat strategis dan perasional dalam pengambilan keputusan;
- 4) Kinerja penerapan manajemen risiko agar digunakan sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan seluruh UPR tingkat strategis unit kerja dan seluruh UPR tingkat operasional unit kerja secara tepat dan diukur pencapaiannya;
- 5) Mempertontonkan sikap antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari, dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan edukatif, serta melaksanakan upaya-upaya pengelolaan risiko korupsi yang bersifat kemitraan dan kolaboratif;
- 6) Memiliki program pelatihan/sertifikasi/in house training terkait manajemen risiko baik semesteran, tahunan, maupun lima tahunan di tingkat Pemerintah Daerah maupun OPD;
- 7) Mendorong pegawai agar menunjukkan kesadaran/keaktifan dalam penerapan MR;
- 8) Menetapkan kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan dan diimplementasikan secara memadai terhadap semua kemitraan yang memiliki peran yang penting dalam organisasi;
- 9) Mengintegrasikan proses manajemen risiko dengan proses bisnis utama, serta menjadikan manajemen risiko sebagai pertimbangan dalam proses perencanaan pada tingkat strategis dan operasional;
- 10) Menetapkan RTP terhadap risiko operasional dan RTP terhadap risiko strategis relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, jelas target waktu, penanggung jawab, ukuran pelaksanaan, dan secara substansi dapat mengurangi dampak/menghilangkan penyebab;
- 11) Menginstruksikan UPR untuk melakukan penilaian risiko korupsi beserta peta risikonya, serta menyusun rencana pengendalian risiko korupsi dan mengevaluasinya;

- 12) Mendorong pegawai agar mengetahui dan memahami strategi dan kebijakan MR, Risk Register, dan RTP yang telah ditetapkan;
- 13) Memberikan keyakinan kepada pengguna saluran whistleblowing internal bahwa kerahasiaan pelapor terlindungi sehingga saluran whistleblowing internal dapat dimanfaatkan secara optimal;
- 14) Menginstruksikan kepada Unit Kepatuhan MR tingkat Pemerintah Daerah untuk melakukan monitoring atas proses manajemen risiko sesuai kebijakan, yaitu:
 - a) Monitoring dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sesuai kebijakan;
 - b) Monitoring dilaksanakan minimal satu kali per semester atau sesuai dengan kebutuhan;
 - c) Mendokumentasikan proses dan hasil Monitoring;
 - d) Melakukan Monitoring sepenuhnya terhadap:
 - (1) Implementasi pengendalian;
 - (2) Kejadian risiko (termasuk mekanisme dan implementasi pelaporan segera);
 - (3) Pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan risiko dan
 - (4) Tindak lanjut atas hasil monitoring.

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor memperoleh nilai 78,66 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah baik. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kota Bogor sudah berjalan dan menunjukkan hasil yang sangat baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

NO	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	Bobot	Komponen yang dinilai	Nilai
			2021			2022
A	Perencanaan Kinerja	30	23,75	30	Perencanaan Kinerja	24,99
B	Pengukuran Kinerja	25	18,70	30	Pengukuran Kinerja	23,40
C	Pelaporan Kinerja	15	12,02	15	Pelaporan Kinerja	11,44
D	Evaluasi Internal	10	7,54	25	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	18,82
E	Capaian Kinerja	20	13,14			-
	Nilai Hasil Evaluasi	100	75,15	100	Nilai Hasil Evaluasi	78,66
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB		Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Wali Kota Bogor beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyempurnakan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2023;
2. Memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja untuk dituangkan pada dokumen perencanaan berjenjang;
3. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi simpeg yang telah diintegrasikan dengan aplikasi E-SAKIP oleh seluruh PD sampai level individu dan menjadikannya sebagai dasar pemberian reward and punishment kepada PD;
4. Mendorong dilakukannya monitoring dan evaluasi kinerja daerah dan OD secara berkala/periodik sehingga dapat memberikan informasi-informasi yang mampu mendorong efektivitas dan efiseiensi dalam mengawal target kinerja daerah. Berikutnya hasil capaian kinerja tersebut dijadikan dasar pemberian reward and punishment;
5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja PD dengan mengacu pada peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 dan menyusun laporan kinerja triwulan, sebagai bahan monitoring capaian kinerja dan

memanfaatkan Laporan kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan dan kinerja;

6. Menyusun pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi intrnal AKIP yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021 tentang pedoman evaluasi AKIP

Kinerja Tambahan :
Membangun budaya kerja profesional dan berintegritas serta sebagai role model bagi perangkat daerah lain

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Sertifikasi Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016	Sertifikat	1	1	100%

Kebijakan Anti Penyuapan

Pernyataan Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam rangka penerapan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan meliputi:

- 1) Melarang seluruh APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor menerima dan melakukan penyuapan serta menetapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan;
- 2) Apabila ada yang memberi hadiah berupa uang, barang, rabat (diskon), fasi-litas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik pada saat penugasan maupun diluar penugasan dan tidak bisa meno-laknya karena adat ketimuran, maka pemberian hadiah tersebut harus dilapor-kan ke unit pelayan gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Bogor selambat-lambatnya 7 hari kerja.
- 3) Memenuhi persyaratan SNI ISO 37001:2016 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anti penyuapan;
- 4) Asas tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan penerapan SNI ISO 37001:2016;
- 5) Mendorong peningkatan kepedulian yang didasari oleh keyakinan yang wajar dan memastikan tidak ada

- tindakan pembalasan terkait dengan pelaporan penyuaapan;
- 6) Melaksanakan peningkatan secara berkelanjutan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuaapan;
 - 7) Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuaapan;
 - 8) Menjamin Kebijakan Anti Penyuaapan dipahami dan diterapkan oleh seluruh APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor, serta ditinjau kesesuaiannya secara terus menerus.

Capaian Sasaran Mutu Penerapan ISO 37001:2016

Pencapaian sasaran mutu dan pemantauan serta hasil pengukuran hasil kinerja dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan diukur dengan monitoring dan evaluasi setiap triwulan.

Pencapaian sasaran penerapan dilakukan pengukuran per tanggal September 2022. Adapun secara ringkas hasil pencapaian sasaran terhadap indikator adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7
Sasaran Penerapan ISO 37001:2016**

No	Sasaran	Target	Pencapaian per Sept 2022
1	Meningkatkan kesadaran anti penyuaapan	100 %	100%
2	Tidak ada APIP yang terlibat dalam Penyuaapan	100 %	100%
3	Laporan Pengaduan terkait penyuaapan di Inspektorat yang ditidakklanjuti	100 %	100%
4	Tidak ada Penyedia barang dan Jasa/Rekan bisnis di Inspektorat yang terlibat dalam penyuaapan	100 %	100%
5	Penegakan sanksi terhadap personil yang terlibat penyuaapan	100 %	100%
6	Indeks Kepuasan Perangkat Daerah /Lembaga /Instansi Lainnya terhadap pelayanan Inspektorat	85,5%	91,21%



3.2 Gambar Certificate Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016

penilaian kesesuaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan SNI ISO 37001:2016 telah dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kota Bogor pada tanggal 8-9 November 2022 secara *on site audit*, Inspektorat Daerah Kota Bogor mendapatkan status *Audit Survailen 1*.

Berdasarkan hasil penilaian kajian teknis dan rapat pengambilan keputusan sertifikasi, Lembaga Sertifikasi Mutu Hijau Indonesia menetapkan dan memutuskan bahwa sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 Inspektorat Daerah Kota Bogor dengan No. 008/MHI-SMAP tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 November 2024. Selama masa berlaku Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 akan dilakukan survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan

sekali. Survailen Kedua akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023.

b. Target dan Kinerja Program

Pengukuran tingkat capaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing masing indikator kinerja.

**Tabel 3.7
Realisasi Indikator Program Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja				Realiasi	Persentase
		Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Vol Target			
1	2	3	4	5	6	7	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Inspektorat Daerah						
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.1	Nilai AKIP Inspektorat	Poin	A	A	100%	
	1.2	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bidang Pengawasan Intern	Poin	3,4	3,53	103,8%	
	1.3	Gap Analisis Kompetensi	%	30	14,70	121,85%	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah						
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.1	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	75%	97,22%	129,62%	
	2.2	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100	100%	
	2.3	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	%	85%	83,33%	98,03%	
	2.4	Persentase tindak lanjut	%	90	92,657	102,95%	

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja				Persentase	
		Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Vol Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	
			rekomendasi pengawasan Internal				
		2.5	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	%	80	91,63	114,54%
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.1	Persentase Penerapan SPIP Pada Perangkat Daerah	%	82	100	121,95%
		3.2	Persentase Capaian MCP KPK	%	76,45	93	121,6%
		3.3	Jumlah PD yang diusulkan mendapatkan Predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	6	6	100%

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

1) Nilai AKIP Inspektorat Daerah Kota Bogor

Nilai AKIP Inspektorat Daerah diukur dari hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Inspektorat Daerah Kota Bogor. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Inspektorat Daerah Kota Bogor pada tahun 2023 memperoleh nilai 80,30 dengan kriteria “A” (Memuaskan >80 – 90), mengalami penurunan poin nilai dengan hasil penilaian tahun sebelumnya adalah sebesar 84,95 dengan kriteria “A” (Memuaskan >80 – 90). Hasil penilaian komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan realisasi kinerja Nilai Akip Inspektorat antara capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Komponen	2021		2022		
		Bobot (%)	Nilai	Komponen	Bobot (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	29,40	Perencanaan Kinerja	30	27,60

No	2021			2022		
	Komponen	Bobot (%)	Nilai	Komponen	Bobot (%)	Nilai
2.	Pengukuran Kinerja	25	21,46	Pengukuran Kinerja	30	21,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,46	Pelaporan Kinerja	15	13,50
4.	Evaluasi Internal	10	7,88	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	23,75
5.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	13,75			
	Jumlah	100	84,95		100	86,45

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

2) Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Bidang Pengawasan Intern

Kuesioner kepuasan pengawasan oleh Inspektorat Kota Bogor merupakan suatu alat ukur intern terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan pada perangkat daerah dan Pemerintah Kota Bogor. Umpan balik dari pengguna jasa pengawasan yang dalam hal ini perangkat daerah sebagai bahan perbaikan berkelanjutan terhadap pengawasan oleh Inspektorat. Dari 266 responden pegawai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor terhadap 20 indikator pengukuran melalui penyebaran google form diperoleh 6 hasil pengukuran dengan skala presentase 100% dan skala 4, adalah sangat baik, dengan rincian yaitu :

- A) Persentase tingkat kepuasan jasa pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bogor, nilai 88,28% (Indeks: 3,53);
- B) Persentase tingkat independensi pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bogor, nilai 88,71% (Indeks: 3,55);
- C) Persentase tingkat integritas pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bogor, nilai 89,42% (Indeks: 3,58);
- D) Persentase tingkat profesionalisme pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bogor, nilai 87,50% (Indeks: 3,50);

- E) Persentase tingkat kepuasan jasa konsultan/ *advice* pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bogor, nilai 87,04% (Indeks: 3,48); dan
- F) Persentase tingkat kemanfaatan pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bogor, nilai 87,93% (Indeks: 3,52).

Hasil pengukuran tingkat kepuasan pengawasan Inspektorat Tahun 2022 secara umum dinyatakan dalam kategori SANGAT BAIK (Mutu layanan A) dengan nilai rata-rata indeks kepuasan pelayanan Indeks Perangkat Daerah 88,15% (Indeks 3,53).

3) Gap Analisis Kompetensi

Berdasarkan Pasal 162 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pengembangan kompetensi PNS merupakan salah satu mata rantai dalam manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit, artinya harus dilakukan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi 20 paling kurang meliputi pendidikan dan pelatihan (diklat), seminar, kursus, penataran, sekolah kader/pelatihan kader dan magang. Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Inspektorat dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis, Seminar dan Diklat Sertifikasi Profesi. Penyelenggaraannya menggunakan kurikulum dan silabus dari lembaga pendidikan pengawasan (Pusdiklatwas BPKP dan lembaga pendidikan lainnya).

Pengembangan pegawai yang diselenggarakan di tahun 2022:

**Tabel 3.9
Daftar Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2022**

No	Nama Diklat	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1.	Diklat Psikologi Audit	42	1-4 November 2022
2.	Diklat Teknik berbasis audit	42	17-21 oktober 2022
3.	Diklat Pengawasan intern Berbasis Komputer	42	12-16 September 2022
4.	Bimtek Penilain SPIP Terintegrasi	42	20 Maret 2022
5.	Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP	42	1 Maret 2022
6.	Bimtek IEPK	42	15-17 November 2022
7.	-Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Bina Jabatan Fungsional Auditor Berkualitas (SIBIJAK)	42	21-22 Juni 2022
8.	Mengikuti Bimtek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor	42	24 May 2022
9.	Pelatihan Audit Forensik	1	27 sd 29 Juni 2022
10.	Pelatihan Pemahaman dan Penerapan ISO 37001-2016 mengenai Sistem Manajemen anti Penyuapan	63	6 Juli 2022
11.	Pelatihan Audit Forensik	1	27 sd 29 Juni 2022
12.	Training Ahli Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi	2	12-15 September 2022
13.	Diklat Sertifikasi QGIA	2	14 November 2022

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

Pengembangan kompetensi tersebut bertujuan serta meningkatkan Pengetahuan (Knowledge), Keterampilan (Skill) dan juga sikap (Attitude) sehingga terwujud profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah (APIP). Setelah dilakukan pengembangan kompetensi gap kompetensi mengalami penurunan dari **21,62% menjadi 14,70%**.

4) Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal “BB”

Ukuran akuntabilitas kinerja dan keandalan sistem manajemen kinerja Perangkat Daerah yang merupakan hasil pencapaian penyelenggaraan pengawsan intern pemerintah (Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring dan *consulting*).

Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, bahwa Pengawasan Intern harus menilai dan memberikan rekomendasi yang memadai untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi dalam:

- Membuat keputusan strategis dan operasional;
- Mengawasi manajemen risiko dan pengendalian;
- Mendorong penerapan etika dan nilai-nilai organisasi;
- Memastikan efektivitas pengelolaan dan akuntabilitas kinerja organisasi;
- Mengomunikasikan informasi risiko dan pengendalian pada area yang sesuai dalam organisasi; dan
- Mengoordinasikan kegiatan dan mengomunikasikan informasi diantara Pimpinan K/L/D, Pimpinan Unit Organisasi, auditor ekstern dan intern, para penyedia jasa asuransi lainnya, serta Pimpinan Unit Kerja.

Evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2022 memperoleh nilai rata-rata 80,30% dengan predikat “BB” (Sangat Baik), sedangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya memperoleh nilai rata-rata 78,56% dengan predikat “BB” (Sangat Baik) dengan akumulasi seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi sebagai berikut:

**Tabel 3.10
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kota Bogor**

No	Komponen	2021		2022		
		Bobot (%)	Nilai	Komponen	Bobot (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,73	Perencanaan Kinerja	30	24,60
2.	Pengukuran Kinerja	25	19,51	Pengukuran Kinerja	30	25,80
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,21	Pelaporan Kinerja	15	11,40

No	2021			2022		
	Komponen	Bobot (%)	Nilai	Komponen	Bobot (%)	Nilai
4.	Evaluasi Internal	10	5,35	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,90
5.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	14,60			
	Jumlah	100	76,40		100	80,30

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

Rekapitulasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11

Jumlah dan Persentase PD berdasarkan kategori nilai

No	Kategori Nilai	Jumlah PD	Jumlah PD
		Tahun 2021	Tahun 2022
1.	AA (Sangat Memuaskan)	-	-
2.	A (Memuaskan)	10	17
3.	BB (Sangat Baik)	17	18
4.	B (Baik)	8	1
5.	CC (Cukup/memadai)	1	-
6.	C (kurang)	-	-
7.	D (Sangat Kurang)	-	-
	Jumlah	36	36

Tahun 2022 jumlah perangkat daerah yang mendapat nilai SAKIP “BB” ke atas sebanyak 36 perangkat daerah atau sebesar 97,22%.

Beberapa kelemahan dalam akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kota bogor sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting);
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam satu periode perencanaan strategis 2019-2024 belum sustainable karena telah mengalami beberapa kali perubahan

yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2022 untuk menyesuaikan perubahan perencanaan pada tingkat Pemerintah Daerah Kota Bogor. belum ada monitoring pencapaian target jangka menengah sampai dengan tahun berjalan.

3. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) serta belum ada analisa didalam LAKIP memuat tentang informasi rencana aksi/upaya perbaikan/penyempurnaan kinerja dalam pencapaian tujuan organisasi (tujuan/sasaran).
4. Sistematika Laporan Kinerja belum disusun sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Pelaporan kinerja (LKIP) beberapa perangkat daerah disampaikan / diupload tidak tepat waktu pada esr.menpan.go.id.
6. Dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Infonnasi (Aplikasi) dan sesuai kriteria 2.
7. Beberapa perangkat daerah belum seluruhnya menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja tahun sebelumnya.

Terhadap kekurangan-kekurangan yang telah dikemukakan di atas kami merekomendasikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).

2. Indikator Kinerja Utama (Hill) Perubahan yang telah ditetapkan Kepala Dinas untuk target 2022-2024 untuk tetap dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sampai dengan penetapan tahun 2024.
3. Menyempurnakan kualitas pelaporan kinerja supaya dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan, penyesuaian penggunaan anggaran, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya serta dapat memberiku perubahan budaya kinerja organisasi
4. Menyusun Laporan Kinerja secara berkualitas sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Menyampaikan Laporan Kinerja/upload (LKIP) pada aplikasi esr.menpan.go.id tepat waktu yaitu sebelum tanggal 31 Maret tahun berjalan.
6. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dan sesuai kriteria
7. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal supaya seluruhnya ditindaklanjuti serta dimanfaatkan untuk perbaikan, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

5) Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual merupakan bagian dari reformasi di bidang keuangan negara yang mengharuskan pemerintah pusat maupun daerah untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi Pemerintah Indonesia telah berubah arah dari basis kas menuju basis akrual dan standar akuntansi tersebut secara penuh wajib diterapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seluruh Indonesia paling lambat pada Tahun

Anggaran 2015. Hal ini membawa konsekuensi bagi Pemda untuk menyajikan Laporan Keuangan (LK) mulai Tahun Anggaran (TA) 2015 sampai dengan sekarang tahun 2022 berbasis akrual, sehingga apabila tidak disajikan berbasis akrual maka BPK dapat memberikan opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor menunjukkan peningkatan akuntabilitas keuangan. Hal ini dapat dilihat pada opini BPK RI atas LK Pemerintah Daerah Kota Bogor selama 5 (lima) tahun berturut-turut mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat tersebut tidak lepas dari dorongan Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam mendorong dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah melalui kegiatan pengawasan Intern berupa Audit Kinerja, Reviu Perencanaan Anggaran, dan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Indikator kinerjanya adalah persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai akuntansi pemerintah.

Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kota Bogor telah melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Tujuannya untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil reviu menunjukkan tidak terdapat penyebab yang menjadikan laporan keuangan tidak disajikan berdasarkan sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang memadai dan standar akuntansi pemerintah.

6) Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal

Monitoring dan evaluasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal BPK RI dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali:

- a) Monitoring tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI periode tahun 2007 sd 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 24 sd 30 Juni 2022;
- b) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Daerah Kota Bogor TA 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2022;

Persentase tindak lanjut pengawasan eksternal sebesar **90,63%**. Angka ini merupakan angka kumulatif perkembangan tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3.3 Grafik Perkembangan Tindak Lanjut Temuan BPK RI

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

1. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Hasil pemeriksaan Tahun 2011 s.d 2021 terdapat 137 temuan dengan 214 rekomendasi dengan penyelesaian tindak lanjut sebanyak 192 rekomendasi yang telah selesai atau 89,72% dan penyelesaian kerugian daerah sebesar Rp6.885.826.257,67 atau 99,33%, dengan rincian sesuai table di bawah ini :

Tabel 3.12
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 - 2021

No.	Tahun Pemeriksaan	Temuan	Rekom	Tindak Lanjut			Keterangan
				S	DP	B	
1	2011	21	25	22	3	-	
2	2012	10	22	6	5	11	
3	2013	8	5	3	2	-	
4	2014	4	12	12	-	-	
5	2015	21	29	29	-	-	

No.	Tahun Pemeriksaan	Temuan	Rekom	Tindak Lanjut			Keterangan
				S	DP	B	
6	2016	7	16	16	-	-	
7	2017	5	15	15	-	-	
8	2018	25	40	40	-	-	
9	2019	3	13	13	-	-	
10	2020	16	19	18	1	-	
11	2021	17	18	18	-	-	
JUMLAH		137	214	192	11	11	S = 89,72 % DP = 5,14 % B = 5,14 %

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

Keterangan :

S : Tindak lanjut telah selesai

DP : Tindak lanjut belum sesuai

B : Belum ditindaklanjuti

Tabel 3.13
Penyelesaian Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat
Provinsi Jawa Barat Tahun Pemeriksaan 2011 - 2021

No.	Tahun Pemeriksaan	Nilai Kerugian (Rp)	Disetor (Rp)	Sisa (Rp)	Keterangan
1	2011	256.134.700,00	256.134.700,00	-	
2	2012	-	-	-	
3	2013	46.759.700,00	-	46.759.700,00	
4	2014	85.176.611,83	85.176.611,83	-	
5	2015	185.278.268,80	185.278.268,80	-	
6	2016	1.739.739.935,38	1.739.739.935,38	-	
7	2017	4.271.957.251,66	4.271.957.251,66	-	
8	2018	62.344.380,00	62.344.380,00	-	
9	2019	-	-	-	
10	2020	10.549.421,00	10.549.421,00	-	
11	2021	274.655.689,00	274.655.689,00	-	
JUMLAH		6.932.585.957,67	6.885.826.257,67	46.759.700,00	S = 99,33 % B = 0,67 %

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Bogor

Pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan APIP s/d saat ini masih dalam proses dan sesuai mekanisme Inspektur Pembantu Khusus hanya akan melakukan pemantauan, jika Sekretariat Inspektorat sudah menyampaikan data yang lengkap dan memenuhi syarat untuk dilakukan pemantauan tindak lanjut, data dimaksud antara lain:

a. Rekapitulasi hasil pemeriksaan (update) dan klasifikasi per jenis temuan/penyimpangan.

b. Matriks temuan hasil pemeriksaan;

Sampai dengan saat ini, Irban Khusus belum dapat melakukan pemantauan karena data tersebut belum seluruhnya disampaikan.

Berikut data hasil pemantauan yang dilakukan Irban Khusus selama tahun 2022:

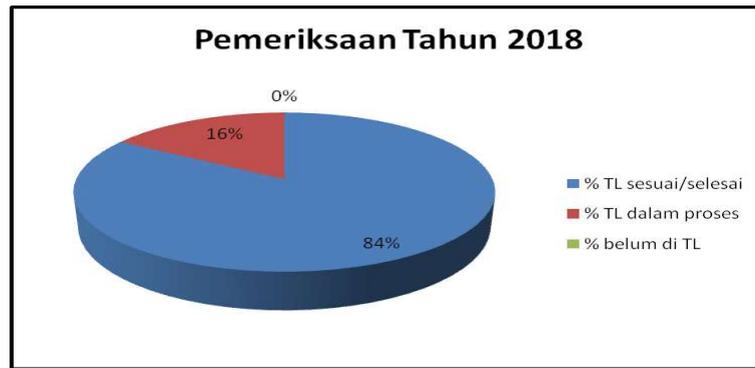
**Tabel 3.14
Rekap pemantauan TLHP Inspektorat Kota Bogor**

No	LHP	Jumlah temuan	Jumlah rekom	Progress Tindak Lanjut			Keterangan
				S	DP	B	
1	Audit Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9	16	16	0	0	
2	Audit Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 Program Pengelolaan Sampah	7	7	7	0	0	
3	Audit Khusus pada SMPN 7	4	4	2	1	1	
4	Audit Khusus pada Kecamatan Tanah Sareal	5	5	1	4	0	
5	Audit Khusus pada Bagian PBJ	2	2	1	1	0	
6	Audit Ketaatan pada UPT Puskesmas Pasir Mulya Tahun 2022	3	4	4	0	0	
	TOTAL	30	38	31	6	1	S : 81,57 % DP: 15,78% B: 2,64%

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

a. Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Bogor untuk tahun 2018.

Pada pemeriksaan Tahun 2018 terdapat 319 temuan dan 529 rekomendasi dengan total kerugian daerah sebesar Rp170.269.432,36,00. Dengan tindak lanjut sesuai sebanyak 443 rekom atau 84%, tindak lanjut dalam proses sebanyak 86 rekom atau 16% dan belum ditindaklanjuti sebanyak 0 rekom atau 0%.



Gambar 3.4 Grafik Pemeriksaan Tindak Lanjut Tahun 2018

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

- b. Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Bogor untuk tahun 2019.

Pada pemeriksaan Tahun 2020 terdapat 124 temuan dan 241 rekomendasi dengan total kerugian daerah sebesar Rp75.815.633,00. Dengan tindak lanjut sesuai sebanyak 114 rekom atau 47%, tindak lanjut dalam proses sebanyak 3 rekom atau 1% dan belum ditindaklanjuti sebanyak 124 rekom atau 52%.



Gambar 3.5 Grafik Pemeriksaan Tindak Lanjut Tahun 2019

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

- c. Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Bogor untuk tahun 2020.

Pada pemeriksaan Tahun 2020 terdapat 60 temuan dan 120 rekomendasi dengan total kerugian daerah sebesar Rp202.331.662,00. Dengan tindak lanjut sesuai sebanyak 29 rekom atau 24%, tindak lanjut dalam proses sebanyak 6 rekom atau 5% dan belum ditindaklanjuti sebanyak 85 rekom atau 71%.



Gambar 3.6 Grafik Pemeriksaan Tindak Lanjut Tahun 2020

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

d. Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Bogor untuk tahun 2021

Pada Tahun 2021 terdapat 2 (dua) kegiatan pelaksanaan Audit:

(1) Audit dengan tujuan tertentu terkait pelaksanaan pengelolaan Dana BOS Reguler APBN TA 2021 pada SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) terdapat 18 temuan dan 37 rekomendasi. dari temuan tersebut sebanyak 33 rekomendasi telah ditindaklanjuti atau sebanyak **89,19%**.

(2) Audit Kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup dan Audit Kinerja Program Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Berdasarkan LHA terdapat 13 temuan dan 24 rekomendasi. LHA tersebut terbit di bulan Desember 2021, sehingga tindak lanjut atas temuan dan rekmedasi tersebut ditindaklanjuti di tahun 2022.

Berdasarkan tindak lanjut hasil pengawasan internal (Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah Kota Bogor) diperoleh rata-rata persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal **sebesar 86,7%**.



Gambar 3.7 Grafik Pemeriksaan Tindak Lanjut Tahun 2021

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

e. Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Bogor untuk tahun 2022

Pada Tahun 2022 terdapat 6 (Enam) kegiatan pelaksanaan Audit:

- (1) Audit dengan tujuan tertentu terkait pelaksanaan pengelolaan Dana Audit Ketaatan terkait Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) terdapat 1 temuan dan 1 rekomendasi. dari temuan tersebut sebanyak seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti atau sebanyak **100%**.
- (2) Audit dengan tujuan tertentu terkait pelaksanaan pengelolaan Dana Audit Dengan Tujuan Tertentu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN (Tahap I dan Tahap II) pada Dinas Pendidikan Kota Bogor dan Satuan Pendidikan Kota Bogor
Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) terdapat 15 temuan dan 54 rekomendasi. dari temuan tersebut sebanyak 54 rekomendasi telah ditindaklanjuti atau sebanyak **100%**.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu terkait pelaksanaan pengelolaan Dana Audit Kinerja Program Rehabilitas Sosial pada Dinas Sosial Kota Bogor
Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) terdapat 6 temuan dan 7 rekomendasi. dari temuan tersebut sebanyak 7 rekomendasi telah ditindaklanjuti atau sebanyak **100%**.
- (4) Audit dengan tujuan tertentu terkait pelaksanaan pengelolaan Dana Audit Ketaatan atas Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Semester I pada Sekretariat Daerah Kota Bogor
Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) terdapat 2 temuan dan 8 rekomendasi. dari temuan tersebut sebanyak 8 rekomendasi telah ditindaklanjuti atau sebanyak **100%**.
- (5) Audit Ketaatan BLUD Puskesmas Pasir Mulya pada Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2022
Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) terdapat 2 temuan dan 5 rekomendasi. dari temuan tersebut sebanyak 5 rekomendasi telah ditindaklanjuti atau sebanyak **100%**.
- (6) Audit Kinerja pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor
Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) terdapat 9 temuan dan 11 rekomendasi. dari temuan tersebut sebanyak 11 rekomendasi telah ditindaklanjuti atau sebanyak **100%**.



Gambar 3.8 Grafik Pemeriksaan Tindak Lanjut Tahun 2022

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

2. Berdasarkan data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Bogor diatas diperoleh rata rata nilai Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas Internal pada tahun 2022 sebesar **92,657%**

7) Persentase Penerapan SPIP Pada Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan Menteri/Kepala/Ketua/pimpinan tertinggi Kementerian/ Lembaga, gubernur, bupati, dan walikota untuk mengimplementasikan SPIP di lingkungannya dan merupakan bagian yang integral dalam proses manajemen pemerintahan. Penerapan SPIP secara efektif diharapkan dan diyakini akan terbangun tata pemerintahan yang baik (*Good Governance government*) yang berdampak pada peningkatan efisiensi serta efektifitas atas pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di seluruh jajaran pemerintahan.

Pengelolaan risiko merupakan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan SPIP, semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risiko maka akan semakin baik penyelenggaraan SPIP, sehingga ukuran keberhasilan penerapan SPIP dilihat dari jumlah

perangkat daerah yang telah menyusun pengelolaan risiko (*risk management*) pada setiap proses bisnis.

Inspektorat Daerah Kota Bogor telah melakukan pendampingan kepada 36 perangkat daerah dalam penyusunan pengelolaan risiko tahun 2022 melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tanggal 23 Desember 2022. Sebanyak 36 perangkat daerah (**100%**) telah menyusun dokumen pengelolaan risiko tahun 2022. Dokumen pengelolaan risiko tahun 2022 tersebut telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor mulai tanggal 12 Januari s.d. 4 Februari 2023. Reviu tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan kesuaian pada hasil penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

8) Persentase Capaian MCP KPK

Monitoring Center For Prevention (MCP) Sebagai Instrument pencegahan Korupsi. Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program MCP. Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi difokuskan pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan potensi korupsi di daerah serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Capaian MCP Pemerintah Kota Bogor **sebesar 93%**. Capaian MCP > 96% menunjukkan implementasi yang baik dalam melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintah melalui: (1) Perencanaan dan Penganggaran APBD, (2) Pengadaan Barang dan Jasa, (3) Perizinan, (4) Pengawasan APIP, (5) Manajemen ASN, (6) Optimalisasi Pajak Daerah dan (7) Manajemen Aset Daerah sebagaimana progress keberhasilan MCP berikut:



Progres Indikator pada Perencanaan dan Penganggaran APBD



Progres Indikator pada Pengadaan Barang dan Jasa



Progres Indikator pada Perizinan



Progres Indikator pada Pengawasan APIP



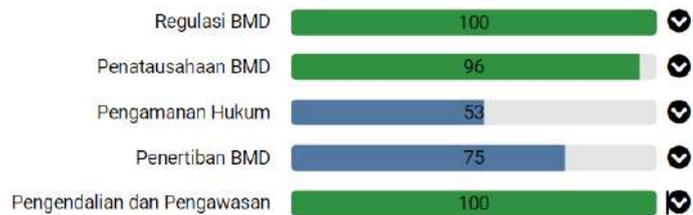
Progres Indikator pada Manajemen ASN



Progres Indikator pada Optimalisasi Pajak Daerah



Progres Indikator pada Pengelolaan BMD



Gambar 3.9 Progres MCP Tahun 2022

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

2. Capaian Kinerja Tahun 2022 dalam Perbandingannya dengan target Capaian Perencanaan Strategis Tahun 2024

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.15
Capaian Kinerja 2022 dalam perbandingannya dengan target capaian perencanaan strategis tahun 2024

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja				Persentase (%)	
		Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Vol Target Tahun 2024	Realiasi Kinerja Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	7	
I	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Inspektorat Daerah	Level Kapabilitas APIP		Level	3	3	100%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.1	Nilai SAKIP Inspektorat	Poin	A	A	100%
		1.2	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bidang Pengawasan Intern	Poin	3,50	3,53	100,85
		1.3	Gap Analisis Kompetensi	%	20	14,70	136,05%
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	-	Level Maturitas SPIP	Level	3	2,880	96%
		-	Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota	Poin	22,50	16,08	71,46%
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	%	75,50	73,06	96,76%
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.1	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	80	97,22	121,525%
		2.2	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	%	95	100	105,26
		2.3	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	%	90	92,657	102,95
		2.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	%	95	91,63	114,54

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja					Persentase (%)
		Uraian Indikator Kinerja		Satuan	Vol Target Tahun 2024	Realiasi Kinerja Tahun 2022	
1	2	3		4	5	6	7
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.1	Persentase Penerapan SPIP Pada Perangkat Daerah	%	90	100	111,11
		3.2	Persentase Capaian MCP KPK	%	77	93	120,7
		3.3	Jumlah PD yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	8	6	75

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

Pada tabel 3.14 perbandingan capaian kinerja dengan target Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2019 – 2024 terdapat keberhasilan capaian kinerja strategis yaitu Level kapabilitas APIP, Nilai SAKIP Inspektorat, Nilai rata-rata indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bidang Pengawasan Intern, Gap analisis kompetensi dan persentase capaian MCP KPK sudah mencapai target 100%. Untuk Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBB, Inspektorat Daerah Kota Bogor menargetkan di tahun 2022 melakukan pendampingan terhadap 6 unit kerja untuk pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dan sampai dengan kondisi tahun 2024 ditargetkan berjumlah 8 (delapan) unit kerja.

3. Faktor Keberhasilan Capaian Kinerja

a. Keberhasilan capaian nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kota Bogor

- 1) Keselarasan antara RPJMD, Renstra, Renja dan IKU
- 2) Capaian kinerja telah mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya;

b. Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Bidang Pengawasan Intern

- 1) Meningkatnya kompetensi Auditor Inspektorat Daerah Kota Bogor, sehingga meningkat pulan profesionalisme pengawasan intern;
- 2) Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016, sehingga terbangun integritas dan independensi dalam melakukan pengawasan intern.

c. Gap Analisis Competensy

- 1) Proses pengembangan kompetensi terus menerus dan berkelanjutan melalui Diklat Substantif, Diklat Sertifikasi, dan bimbingan teknis;
- 2) Program pengembangan kompetensi dari tahun ke tahun.

d. Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"

- 1) Meningkatnya capaian komponen perencanaan kinerja;
- 2) Meningkatnya capaian komponen pengukuran kinerja;
- 3) Meningkatnya capaian komponen pelaporan kinerja;
- 4) Meningkatnya capaian komponen kinerja organisasi.

e. Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

- 1) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pengelolaan keuangan dan barang antara lain melalui SIMRAL, SIMDA dan SIPD
- 2) Sistem pengendalian intern yang telah memadai.

f. Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal dan eksternal

- 1) Tindak lanjut atas temuan dari perangkat daerah direspons dengan baik;
- 2) Proses verifikasi tindak lanjut atas temuan dengan cepat;

g. Analisis keberhasilan capaian penerapan SPIP

- 1) Komitmen dari Walikota terhadap penerapan SPIP pada pemerintah Kota Bogor.
- 2) Komitemen dari Kepala Perangkat Daerah terhadap penerapan SPIP dan penyiapan bukti-bukti dalam implementasi.
- 3) Pembinaan dari BPKP Perwakilan Jawa Barat yang sangat intensif membantu Pemerintah Kota Bogor.
- 4) Telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) SPIP di masing-masing Perangkat Daerah yang terdiri dari Kepala, Sekretaris, Eselon III, Kasubag, dan Pelaksana.

- 5) Peran Inspektorat Daerah yang kuat dalam melakukan koordinasi dan mengarahkan Satgas SPIP di masing-masing Perangkat Daerah.
- 6) Pembinaan dan monitoring yang intensif dari Inspektorat Daerah terhadap Perangkat Daerah yang dilakukan uji sampel dalam penerapan SPIP.
- 7) Tim Inspektorat Daerah yang solid dan penuh didikasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

h. Persentase Capaian MCP KPK

Meningkatnya langka-langkah perbaikan tata kelola pemerintah melalui:

- (1) Perencanaan dan Penganggaran APBD
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa
- (3) Perizinan
- (4) Pengawasan APIP
- (5) Manajemen ASN
- (6) Optimalisasi Pajak Daerah dan
- (7) Manajemen Aset Daerah.

4. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp18.980.289.880,00 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp19.922.456.419 Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level perangkat daerah adalah 4,73% atau sebesar Rp942.166.539,00. Berdasarkan besaran penggunaan anggaran maka dapat diasumsikan telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya biaya pada Inspektorat Daerah Kota Bogor.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui rangkap penugasan Auditor dan P2UPD dalam melaksanakan pengawasan intern penyelenggaraan pemerintah daerah.

Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian (%)	Efisiensi (%)
1						
Sasaran 1	Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah	19.349.379.119	17.058.402.012	2.290.977.107	88,16	11,84
Sasaran 2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	573.077.300	286.172.400	286.904.900	49,93	50,06
Total		19.922.456.419	17.344.574.412	2.577.882.007	87,06	12,94

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 2 sasaran, dengan tingkat efisiensi sebesar 4% yang rinciannya sebagai berikut :

1. Kinerja Sasaran “**Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah**” tercapai melalui presentase Level Kapabilitas APIP sebesar 100%, presentase Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah sebesar 103,82, presentase Nilai SAKIP dengan Nilai Maksimal A, Gap Analisis sebesar 121,85% dengan efisiensi anggaran sebesar 4%.
2. Kinerja Sasaran “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah**” tercapai melalui Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB" 129,6% Persentase penanganan pengaduan masyarakat sebesar 100%, Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas Internal Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas Internal 102,95% Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas eksternal sebesar 114,54% Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 117,65 Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sebesar 121,95% Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM sebesar 100%,

dan Persentase Capaian MCP KPK sebesar 120,7% dengan efisiensi anggaran sebesar 7,53%

Capaian Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tabel 3.16
Capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang keberhasilan kinerja sasaran Tahun 2022

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			TARGET	REALISAS		
1	2	3	4	5	6	7
A Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks	3,4	3,53		
	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	A	A		
	Gap Analysis Kompetensi	%	30	14,70		
1 Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat Daerah	%	100	100	Secara umum pelaksanaan sub kegiatan ini tidak mengalami permasalahan yang berarti	
a	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6		
b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5		
2 Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah secara tepat waktu dan sesuai regulasi	%	100	100	Secara umum pelaksanaan sub kegiatan ini tidak mengalami permasalahan yang berarti	
a	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / bulan	52	52		
3 Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	Secara umum pelaksanaan sub kegiatan ini tidak mengalami permasalahan yang berarti	
a	Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	10	10		
b	Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	52	52		
4 Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	Secara umum pelaksanaan sub kegiatan ini tidak mengalami	

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					TARGET	REALISAS		
1			2	3	4	5	6	7
a		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	permasalahan yang berarti	
b		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	6		
c		Sub Kegiatan:Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	Paket	1	1		
d		Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	7		
e		Sub Kegiatan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1		
5	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	%	90	90	Secara umum pelaksanaan sub kegiatan ini tidak mengalami permasalahan yang berarti	
a		Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1		
b		Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	37	37		
6	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	Secara umum pelaksanaan sub kegiatan ini tidak mengalami permasalahan yang berarti	
a		Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	6		
b		Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7	7		
7	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD lingkup Inspektorat berkondisi baik	%	100	100	Secara umum pelaksanaan sub kegiatan ini tidak mengalami permasalahan yang berarti	
a		Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7		
b		Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	92	92		
c		Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	1		
B	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	75,00	97,22		

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				TARGET	REALISAS		
1		2	3	4	5	6	7
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100		
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas Internal	%	92,657	102,95		
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas eksternal	%	91,63	114,54		
		Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	%	85	100		
8	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	kegiatan	2	2	Secara umum pelaksanaan sub kegiatan ini tidak mengalami permasalahan yang berarti	
a	Sub Kegiatan: Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	6	4		
b	Sub Kegiatan: Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	1	7		
c	Sub Kegiatan: Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	36	26		
d	Sub Kegiatan: Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	52		
e	Sub Kegiatan: Kerja sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1		
f	Sub Kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	4		
9	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan pengaduan yang diselesaikan sesuai kewenangan	%	100	100		
a	Sub Kegiatan: Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	1		
b	Sub Kegiatan: Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	1	5		
C	Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Aistensi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	%	82	100		
		Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	Unit Kerja	6	6		
		Persentase Capaian MCP KPK	%	76,45	96,33		

**INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)**

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			TARGET	REALISAS		
1	2	3	4	5	6	7
10	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	Jumlah jenis dokumen NSPK di bidang pengawasan (dan fasilitasi pengawasan)	NSPK	2	2	Secara umum pelaksanaan sub kegiatan ini tidak mengalami permasalahan yang berarti
a	Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	1	
b	Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	1	
11	Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Manajemen Risiko	%	80,00	80,00	Secara umum pelaksanaan sub kegiatan ini tidak mengalami permasalahan yang berarti
		Jumlah Unit Kerja yang dilakukan pendampingan Pelaksanaan RB bidang penguatan pengawasan dan pembangunan ZI menuju WBK	Unit Kerja	10	10	
		Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan Evaluasi MCP KPK Pemerintah Kota Bogor	kegiatan	2	2	
a	Sub Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	36	36	
b	Sub Kegiatan: Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	36	36	
c	Sub Kegiatan: Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	2	2	
d	Sub Kegiatan: Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	36	36	

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

B. Realisasi Anggaran

Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kota Bogor mendapatkan alokasi anggaran awal sebesar Rp.17.972.870.473,00 dan selanjutnya

mengalami refocusing anggaran menjadi Rp.19.922.456.419,00 realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp.18.980.289.880,00 dengan capaian **95,27%**. Alokasi anggaran tersebut dijabarkan kedalam 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan. Penjelasan rinci alokasi anggaran dan realisasinya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.17
Alokasi dan realisasi anggaran tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Realisasi	
				(RP)	(%)
1	2	3	4	5	6
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.336.884.473	19.349.379.119	19.349.379.119	95,99
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	185.991.400	179.619.800	155.756.300	86,71
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.909.537.031	15.199.451.152	14.997.199.036	98,67
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.110.583.000	1.048.000.800	890.860.000	85,01
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	877.419.650	906.414.600	713.149.728	78,68
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.938.000	722.665.200	699.981.000	96,86
6	Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah	517.163.392	545.547.567	469.823.007	86,12
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709.252.000	747.680.000	645.740.659	86,37
B	Program Penyelenggaraan Pengawasan	414.812.200	401.792.200	249.384.650	62,07
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	348.269.200	336.749.200	233.184.650	69,25
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	66.543.000	65.043.000	16.200.000	24,91
C	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Aistensi	221.173.800	171.285.100	158.395.500	92,47
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas	45.836.800	38.556.800	34.940.000	90,62
2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	175.337.000	132.728.300	123.455.500	93,01
	Jumlah Belanja Daerah	17.972.870.473	19.922.456.419	18.980.289.880	95,27

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

BAB IV PENUTUP

Pencapaian keberhasilan Inspektorat dalam mencapai sasaran strategis terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
Tujuan: Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Level	A	BB	95%
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah	Level Kapabilitas APiP	Level	3	3	100%
	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Poin	80,01	75,81	94,75%
Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP	Level	3	2,988	99,6%
	Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota	Poin	22,50	18,82	83,64
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	%	75,00	73,06	97,41%

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

Pencapaian berikutnya adalah keberhasilan menerapkan sistem manajemen anti penyuapan dengan diraih kembali sertifikasi ISO 37001:2016 *Anti-Bribery Management Systems*.

Keberhasilan capaian kinerja program Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2022 terangkum pada table dibawah ini:

Tabel 4.2
Realisasi Indikator Program Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2022

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja				Realiasi	Persentase
		Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Vol Target			
1	2	3	4	5	6	7	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Inspektorat Daerah						
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.1	Nilai AKIP Inspektorat	Poin	A	A	100%
		1.2	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bidang Pengawasan Intern	Poin	3,4	3,53	103,8%
		1.3	Gap Analisis Kompetensi	%	30	14,70	121,85%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah						
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.1	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	75%	97,22%	129,62%
		2.2	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100	100%
		2.3	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	%	85%	83,33%	98,03%
		2.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	%	90	92,657	102,95
		2.5	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	%	80	91,63	114,54
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.1	Persentase Penerapan SPIP Pada Perangkat Daerah	%	82	100	121,95%
		3.2	Persentase Capaian MCP KPK	%	76,45	93	121,6%
		3.3	Jumlah PD yang diusulkan mendapatkan Predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	6	6	100%

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

LANGKAH PERBAIKAN KINERJA ORGANISASI

Untuk meningkatkan capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor dimasa yang akan datang diperlukan langkah-langkah yang harus ditempuh, sebagai berikut :

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah
 - a) Sosialisasi terkait Budaya kerja dan pengukurannya kepada Pegawai Inspektorat;

- b) Monitoring dan Evaluasi terkait dengan pencapaian hasil penilaian mandiri RB.
- 2) Level Maturitas SPIP
- a) pemutakhiran regulasi terkait dengan pengelolaan Manajemen Risiko dan Pengendalian kecurangan;
 - b) Melakukan penilaian mandiri SPIP Integratif yang meliputi, pengukuran nilai SPIP, Nilai MRI, Nilai IEPK;
 - c) Melakukan penilaian risiko untuk tingkat pemerintah Kota Bogor;
 - d) Melakukan Sosialisasi dan pendampingan terkait indeks efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK).
- 3) Indeks Persepsi Anti Korupsi
- a) Sosialisasi pencegahan korupsi dan integritas kepada pegawai PD yang memberikan pelayanan publik secara bertahap;
 - b) Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan integritas kepada masyarakat/Pihak penerima layanan publik pemerintah (Pamflet, banner, informasi digital lainnya).
- 4) Presentase Tindak Lanjut rekomendasi Pengawasan Internal
- a) Rekomendasi Hasil Pengawasan dikomunikasikan secara intensif oleh Tim Pengawas kepada Perangkat Daerah;
 - b) Optimalisasi pemanfaatan modul Tindak Lanjut pada aplikasi SIMAPAN.

